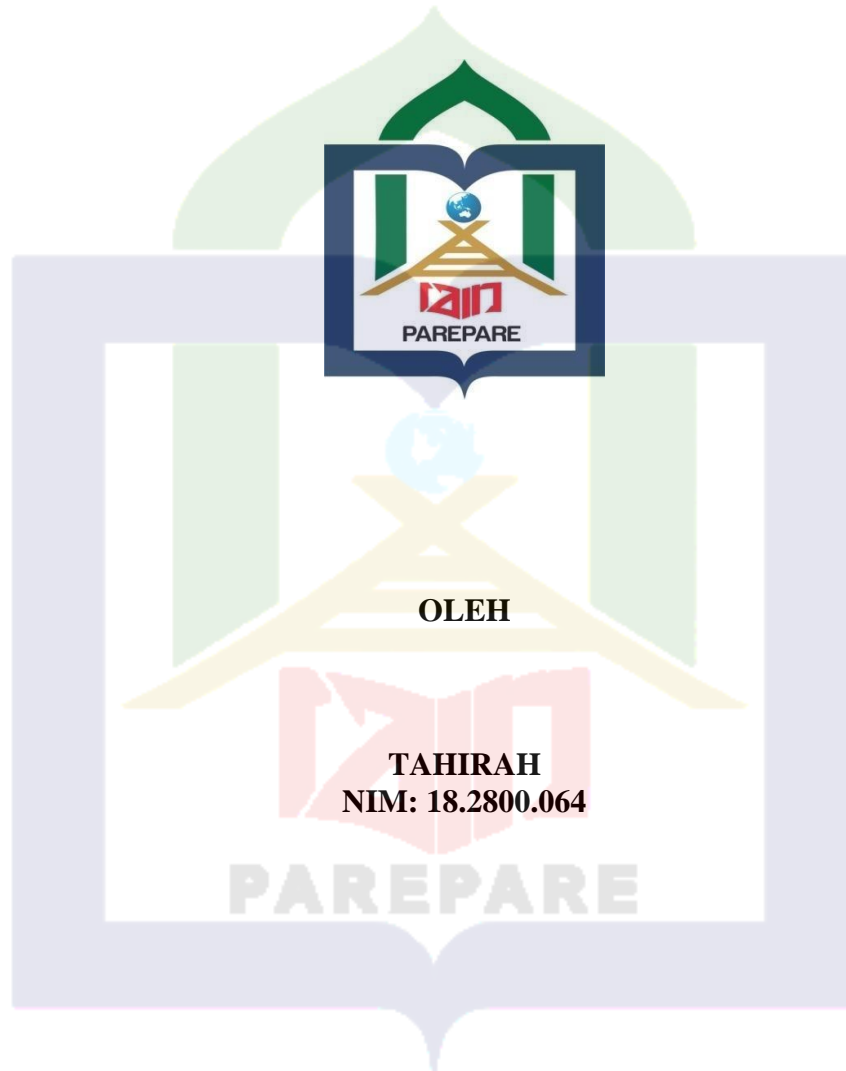


SKRIPSI

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA DI MATA
ALLO KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA DI MATA
ALLO KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**TAHIRAH
NIM: 18.2800.064**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada
Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA DI MATA
ALLO KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Terapan Akuntansi**

Program Studi

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

**TAHIRAH
NIM: 18.2800.064**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa
di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang

Nama Mahasiswa : Tahirah

NIM : 18.2800.064

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2279/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 197606042006042001

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 197209292008011012



Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nur Hafidah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa
Di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang

Nama Mahasiswa : Tahirah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.064

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2278/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

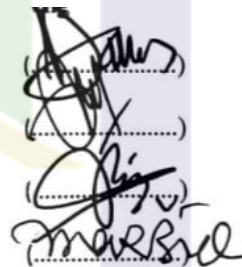
Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Ketua)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekretaris)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)

Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd. (Anggota)



Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Nur Hafidah Muhammadun, M.Ag.

197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah Tahang dan Ibunda Rusmini, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Januari 2023

Penulis,



Tahirah
18.2800.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tahirah
NIM : 18.2800.064
Tempat/Tanggal Lahir : Bulu. 12 Desember 2000
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di
Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2023

Penulis,



Tahirah
18.2800.064

ABSTRAK

Tahirah, Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang(Dibimbing oleh Damirah dan Abdul Hamid)

Penelitian ini membahas tentang Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, permasalahan yang terjadi ialah kurangnya sosialisasi terkait dengan realisasi penyaluran dan penyerapan anggaran dana desa di Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk dan system penyaluran dan penyerapan anggaran dana Desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tahun 2021.

Metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data primer yang digunakan ialah laporan realisasi anggaran dana desa terhadap kinerja keuangan Desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tahun 2021.

Hasil dari penelitian ini yaitu. 1) Bentuk penyerapan anggaran dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 yaitu penyaluran kedalam beberapa bidang diantaranya penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa (Sarana) , Bidang Administrasi dan Praja Pemerintah, Bidang Kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan dan dana darurat dengan jumlah dana anggaran 109,693,552 dengan realisasi 97,891,000 dan selisih anggaran 11,802,552, penyaluran anggaran dengan alokasi penyerapan berjumlah 90% telah tersalurkan dan selisih alokasi sebesar 10% sisa dari rencana anggaran yang disalurkan. 2) Sistem Penyajian Laporan Keuangan Realiasasi Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 merujuk pada tiga aspek penyajian yang dilakukan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam melaporkan keuangan Desa yaitu aspek penyajian laporan keuangan berkaitan dengan pendapatan, keuangan merujuk pada aspek belanja dan pembiayaan maka sistem penyajian keuangan menggunakan sistem Kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaranannya

Kata kunci: Analisis , laporan realisasi, dana desa,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Laporan Keuangan.....	14
a) Efektifitas Kinerja penggunaan Keuangan	16
2. Konsep Anggaran	19
3. Laporan Realisasi Anggaran.....	21
4. Dana Desa.....	25
5. Teori Akuntansi Syariah	35
C. Tinjauan Konseptual	37

D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Instrument Penelitian	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Penyerapan Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021	48
2. Sistem Penyajian Laporan Keuangan Realisasi Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73
BIODATA PENULIS	83

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Laporan Realisasi Desa Mata Allo Tahun 2017-2021	3
2.1	Kriteria Kinerja Keuangan	14
4.1	Deskripsi Anggaran Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	43
4.2	Deskripsi Anggaran Bidang Pembangunan Des	45
4.3	Deskripsi Anggaran Bidang Administrasi dan Praja Pemerinta	46
4.4	Anggaran Bidang Pembangunana Desa	47
4.5	Anggaran Bidang Kemasyarakatan, pemberdayaan dan dana darurat	48
4.6	Deskripsi Format penyajian Laporan	52
4.7	Penjabaran Pendapatan Anggaran	53
4.8	Penjabaran Jumlah Pembiayaan	53

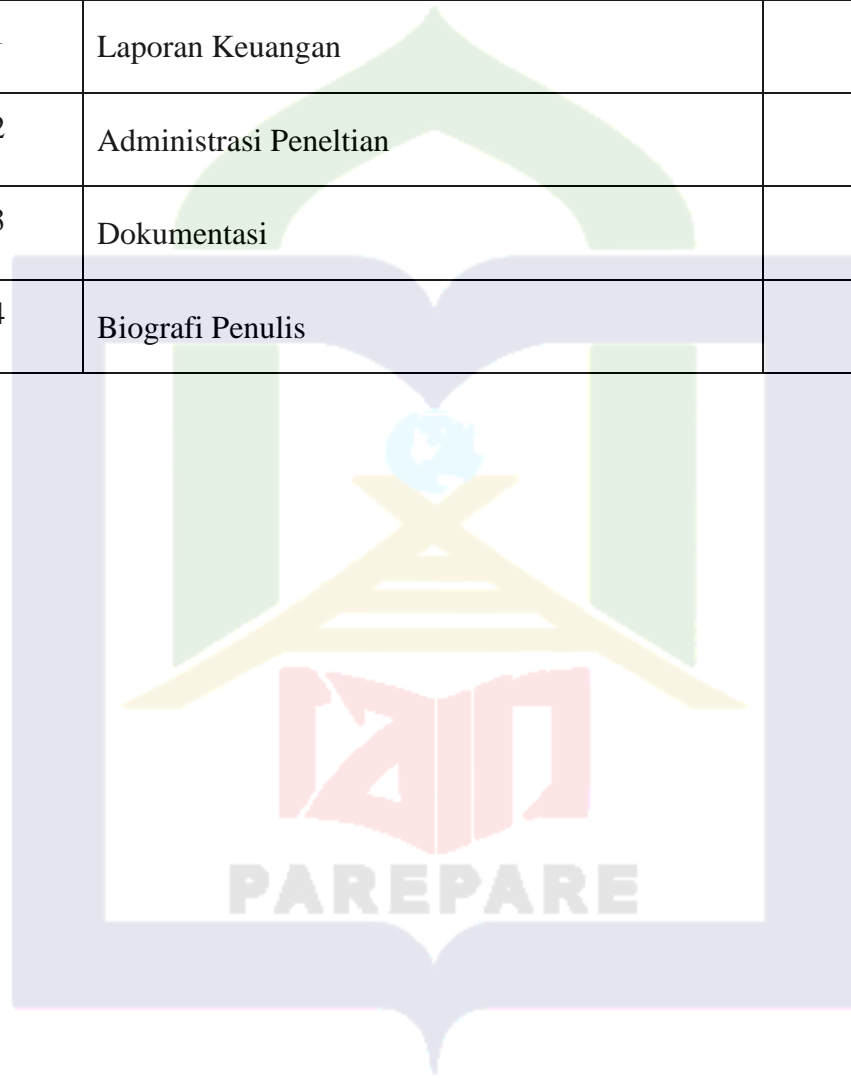
DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Laporan Keuangan	I
2	Administrasi Penelitian	II
3	Dokumentasi	III
4	Biografi Penulis	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran yang disusun oleh entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realisasi anggaran yang semestinya. Berdasarkan siklus akuntansi sektor publik, setelah dilakukannya proses penganggaran, kemudian anggaran itu di realisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi publik. Dengan kata lain, realisasi program merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik, termasuk dalam hal ini organisasi Kecamatan dan Desa.

Pelaksanaan anggaran dalam sebuah program adalah proses dimana sumber daya keuangan tersedia untuk agen yang diarahkan dan dikendalikan demi mencapai tujuan serta objek anggaran yang telah disetujui¹. Berdasarkan literatur, realisasi pelaksanaan program terkait dengan istilah “*operational management*”. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik

¹Indra Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*, (Jakarta, 2015), h. 299.

mencapai tujuannya melalui penambahan yang efisien dan penggunaan sumber daya. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik, atau penyedia layanan, mempunyai fungsi operasional. Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi.

Manajemen operasi melibatkan produksi barang dan jasa, individu yang termasuk dalam rencana operasi, dan koordinasi operasi dalam suatu organisasi, termasuk organisasi Kecamatan dan Desa. Pengelolaan operasi organisasi Kecamatan dan Desa mengarahkan bagaimana fasilitas Kecamatan dan Desa harus ditata, menciptakan kebijakan Kecamatan dan Desa. Mengendalikan persediaan dan distribusi, serta mengatur jadwal pegawai di organisasi Kecamatan dan Desa.

Tujuan dari Penetapan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan realisasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya

ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/ APBD) dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepuasan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Berikut Laporan Realisasi Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang tahun 2017-2021.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Desa Mata Allo Tahun 2017-2021

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa DD TAYL yang dianggarkan kembali	Penyerapan DD	Sisa DD yang dianggarkan tahun berikutnya	Sisa DD yang Disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2+3)-(4+5)
2017	796,802,000	0	796,802,000	0	0
2018	759,553,000	0	731,053,000	28,500,000	0
2019	1,445,048,328	0	1,415,868,013	29,180,315	0
2020	1,445,126,496	0	1,416,630,997	28,495,499	0
2021	1,435,326,910	0	1,323,435,213	111,891,697	0

LRA dan SAP di nyatakan dalam PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP ini berisikan prinsip-prinsip mengenai LRA. Tujuan standar LRA menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah

dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lahirnya Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (Otonomi daerah) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan.

Siklus realisasi program Kecamatan dan Desa terdiri dari rangkaian kegiatan setelah penganggaran ditetapkan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan program tersebut. Siklus realisasi program Kecamatan dan Desa dibagi ke dalam 3 tahapan kegiatan yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.² Masing-masing tahapan realisasi program Kecamatan dan Desa terbagi lagi ke dalam tiga kegiatan utama yakni pencairan anggaran (pengeluaran) Kecamatan dan Desa, realisasi pendapatan Kecamatan dan Desa, dan pelaksanaan program Kecamatan dan Desa.

Masing-masing kegiatan utama tersebut berlaku siklus realisasi program kecamatan dan desa, dimana masing-masing kegiatan utama terbagi lagi ke dalam kegiatan per tahapan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian.

1. Pencairan anggaran (pengeluaran) kecamatan dan desa, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan memenuhi prosedur dan formulir serta

²Indra Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*, (Jakarta, 2015), h. 322.

pembuatan anggaran kas, tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan belanja barang, jasa, dan modal. Dan tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, finalisasi tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan kegiatan.

2. Realisasi pendapatan kecamatan dan desa, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan memenuhi prosedur serta formulir anggaran kecamatan dan desa, tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penerimaan pendapatan kecamatan dan desa. Tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan kecamatan dan desa.
3. Pelaksanaan kegiatan kecamatan dan desa, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari konsolidasi masyarakat, pembentukan panitia, dan rembung desa tentang pelaksanaan kegiatan. Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan, dan tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan peresmian hasil kegiatan, pembuatan laporan SPJ kegiatan, serta pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.³

Hadirnya undang-undang yang telah dijelaskan diatas telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemda tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih

³Arfiansyah, M.A, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Journal Of Islamic Finance And Accounting*, Vol.3, No.1, Tahun 2020

memberdayakan daerahnya sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otda adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Selain itu, keadaan luar negeri banyak menunjukkan bahwa semakin meraknya globalisasi yang menuntut daya sains tiap negara, termasuk setiap Pemdanya. Hal tersebut akan tercapai dengan meningkatkan kemandirian Pemda melalui program otda. Tujuan program otda yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun karakteristik di daerahnya masing-masing.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Adapun masalah yang sering dihadapi dalam penyusunan APBD yakni salah satunya keterlambatan penyusunan APBD, dimana keterlambatan penyusunan APBD memiliki dampak yang sangat merugikan bagi semua pihak dari masyarakat maupun pemerintah. Dengan hal ini untuk mengatasi

permasalahan tersebut perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan APBD dapat lebih terfokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan dan tidak lagi teralut terbebani dengan transaksi-transaksi politik. Serta perlu juga dikembangkan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Tujuan utama dilakukannya langkah ini adalah untuk mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada penganggaran uang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang menjawab akar permasalahan di masyarakat. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan.

Pemda sebagai pihak yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya masing-masing untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan merupakan salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penyerapan anggaran dana desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tahun 2021?
2. Bagaimana sistem penyajian laporan keuangan realisasi dana desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti ini yakni:

1. Untuk mengetahui bentuk penyerapan anggaran dana desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tahun 2021.
2. Untuk mengetahui sistem penyajian laporan keuangan realisasi dana desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Di sisi lain tinjauan penelitian relevan merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang ada sebelumnya dan dapat menguatkan argument, sehingga penulis dapat mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

1. Ade Khusnul Khotimah dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kabumen Tahun Anggaran 2014-2017”. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan efisiensi adalah ketepatan cara yang dilakukan agar suatu pekerjaan mencapai hasil yang maksimal tanpa mengeluarkan sumber daya yang berlebihan atau menyia-nyiakkan sumber daya yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat efisiensi realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah kabupaten kebumen tahun anggaran 2014-2017. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji tentang realisasi anggaran dan juga kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah lokasi yang merupakan objek penelitian serta fokus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada laporan realisasi anggaran dana desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi

kinerja pemerintah. Perbedaan hasil dari kedua penelitian ini yakni, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana hasil merujuk pada tingkat realisasi anggaran mencapai 90% yang artinya anggaran realisasi sangat efektif, sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Kabumen tahun anggaran 2014-2017 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan tingkat presentasi efektivitas rata-rata diatas 100%.

2. Florensi Oktallia dengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Pelaporan Pada Laporan Realisasi APBDes”. Pelaksanaan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil. Sedangkan pelaporan laporan keuangan desa merupakan laporan keuangan desa yang digunakan sebagai wujud pertanggung jawaban selama pelaksanaan berkaitan dengan pendanaan di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kesesuaian pelaksanaan dan pelaporan pada laporan realisasi APBDes di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah yaitu mengkaji tentang laporan realisasi. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian dan penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan pelaporan pada laporan realisasi APBDes, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada laporan realisasi anggaran dana desa. Perbedaan selanjutnya mengenai hasil penelitian dimana

penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam hal pelaksanaan pada laporan realisasi APBDes telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sedangkan dalam hal pelaporan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada hal pelaporan masih harus diperbaiki lagi dikarenakan waktu pelaporan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target namun termasuk dalam kategori efektif, hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan.

3. A. Indah Nurfadillah dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone”. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana laporan realisasi anggaran mencerminkan kinerja keuangan pemerintah di kabupaten bone. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif. Sedangkan Perbedaannya terdapat di metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti

menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni tinjauan pustaka dan penelitian lapangan. Selanjutnya perbedaan hasil dari kedua penelitian ini yakni, penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa bentuk penyaluran anggaran dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten enrekang Tahun 2021 yaitu penyaluran keberbagai bidang diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa (sarana), bidang administrasi dan praja pemerintah, bidang kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan dan dana darurat dengan penyaluran anggaran dengan alokasi penyerapan berjumlah 90% telah disalurkan dan selisih alikasi sebesar 10% sisa dari anggaran yang telah disalurkan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana hasil merujuk pada tingkat realisasi anggaran mencapai 90% yang artinya realisasi anggaran sangat efektif, sedangkan hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa kemandirian pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19% pada tahun 2014 menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016.

4. Siti Mardhiyah Ulfa dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada dinas perhubungan kota medan sudah berjalan efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan pengetahuan tentang merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada dinas perhubungan kota medan, serta diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitukeduanya merupakan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelelitian ini berfokus pada realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada laporan realisasi anggaran dana desa. Serta perbedaan kedua penelitian ini yang terdapat di tinjauan pustaka. Perbedaan kedua terdapat di teknik pengumpulan data yang dimana penelitian ini cuman menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni dokumentasi. Perbedaan ketiga terdapat di teknik analisis data yang dimana penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data yaitu analisis efektivitas dan efisiensi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti ada tiga yakni uji deskriptif data, pengelompokan data, dan penjabaran angka. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni, hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dimana kinerja belanja daerah Kabupaten Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien . Hal ini terlihat dari tidak adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan, sedangkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Medan

Tahun 2015-2017 dikatakan tidak efektif disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih sangat jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan (*Financial Statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.⁴

Laporan keuangan pada umumnya itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya sering diikutsertakan laporan-laporan lainnya yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan-laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan biaya produksi.

⁴ Hery, S.E., M.Si. *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), h.2.

Bentuk-bentuk laporan keuangan diantaranya:

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan perusahaan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan).

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.

4. Laporan Arus Kas (*Statement Of Cash Flows*)

Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/ pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/ penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode belanja serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.⁵

Munawir mengatakan Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga (daftar surplus). Daftar ketiga yaitu daftar surplus atau kemungkinan terjadi defisit, biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang dibuat manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan laporan kepada pihak lain yang berkepentingan.⁶

a) Efektifitas Kinerja penggunaan Keuangan

Analisis Efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan total anggaran pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

⁵ Dr. Kasmir, S.E., M.M. Analisis Laporan Keuangan. (Depok: Rajawali Pers, 2019)

⁶Munawir, Pengantar Manajemen Keuangan Akuntansi. (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 100

Mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan menggunakan efektivitas tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah. Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
≥60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Penjelasan tabel kriteria kinerja keuangan diatas, maka usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan dikatakan efektif jika persentase kinerja keuangannya antara >90% - 100%. Sebaliknya dikatakan tidakn efektif jika persentasi kinerja keuangannya berada dibawah dari 60%.

Hasibuan berpendapat bahwa efesiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan hasil antara biaya dan keuntungan (output), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.⁷

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan atau

⁷Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertiandan Masalah*. (Jakarta: Gunung Agung. 1984)

proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan total realisasi pendapatan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah.

Kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
>90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
≥60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Tabel kriteria kinerja keuangan tersebut diatas, maka usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan dikatakan efisien jika persentasi kinerja keuangan antara 60% - 80%.Sebaliknya dikatakan tidak efisien jika persentase kinerja keuangan berada diatas 100%.

2. Konsep Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang.

Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan priodik (biasanya dalam priode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/ pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Keberhasilan pemerintah tidak mungkin tercapai jika tidak memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan tercermin pada system penganggaran yang baik dan terkoordinasi. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan untuk masa yang akan datang, sedangkan pengendalian merupakan alat untuk memastikan dan menjamin bahwa seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Tiga fungsi anggaran yaitu sebagai alat pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan.

- a. Anggaran sebagai rencana kerja, yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu dan perkiraan atas masa depan. Anggaran merupakan aspek perencanaan

yang penting, menggunakan dana (sumberdaya) yang tersedia seefisien mungkin. Hal ini dilakukan karena dana merupakan sumber daya yang langka dan sudah menjadi kebiasaan bahwa dana yang dibutuhkan melebihi yang tersedia. Maka dari itu anggaran harus disusun secara teliti dan efisien sehingga mampu menjadi suatu petunjuk bagi setiap pelaksanaannya dalam melaksanakan kegiatan.

- b. Anggaran sebagai alat koordinasi, pada sektor ekonomi perusahaan koordinasi merupakan suatu usaha agar semua bagian dalam perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan keselarasan dalam tindakan, sehingga tercipta pula keselarasan tujuan. Tindakan dalam hal ini kegiatan perusahaan yang kebutuhan dan hanya tercantum dalam anggaran, yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan yang berwenang (dalam hal keuangan). Kegiatan akan di setujui apabila tidak menyimpang dari anggaran dan tujuan perusahaan. Maka dari itu, anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi mampu menyelaraskan kegiatan dan tujuan perusahaan.
- c. Anggaran sebagai alat pengawasan, pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pencapaian hasil dan perencanaan aktivitas. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya merupakan bentuk dari pengawasan tersebut. Melalui perbandingan tersebut dapat dilihat seberapa jauh *slack* (perbedaan) dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran dalam periode berikutnya.

3. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya⁸. Dengan kata lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan membuat informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Halkadri Fitra, Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah, (Purwokerto, 2019), h. 36.

Berikut ini pengertian laporan realisasi anggaran menurut para ahli diantaranya:

1) Menurut Dedi Nordiawan

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan.⁹

2) Menurut Rudianto

Laporan realisasi anggaran adalah rencana kegiatan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.¹⁰

3) Indra Bastian

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang direalisasikan dalam APBD di akhir periode.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan serangkaian aktivitas yang menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

⁹Dodi Nordiawan, Akuntansi Sektor Publik. (Jakarta: Salemba Empat. 2019) h. 23

¹⁰Rudianto, Akuntansi Manajemen : Pengantar untuk pengambilan keputusan (Jakarta: Erlangga. 2013) h. 15

b. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mencakupi beberapa unsur yakni pendapatan LRA, transfer, belanja dan pembiayaan. Berikut penjelasan lengkap mengenai unsur laporan realisasi anggaran:

1) Pendapatan LRA

Unsur pertama yakni pendapatan laporan realisasi anggaran atau diartikan sebagai penerimaan dari Bendahara Umum Daerah/ Negara. Bisa juga dari entitas pemerintah yang lain dengan menambahkan saldo untuk anggaran lebih pada suatu periode anggaran yang dimaksud serta menjadi hak pemerintah, dengan artian tidak harus dibayar kembali.¹¹

2) Belanja

Unsur berikutnya adalah belanja yang mencakup keseluruhan pengeluaran dari Bendahara Umum Daerah/ Negara. Kegiatan belanja ini umumnya menurunkan saldo anggaran lebih pada suatu periode anggaran yang bersangkutan.

3) Transfer

Transfer adalah penerimaan dan pengeluaran uang dari suatu entitas dengan entitas yang lain. Termasuk didalamnya mencakup dana bagi hasil dan dana perimbangan atas suatu proyek.

4) Pembiayaan

Financing atau pembiayaan adalah setiap jenis transaksi pengeluaran atau penerimaan yang tidak akan mempengaruhi kekayaan suatu entitas. Semua jenis pembiayaan wajib dibayar dan akan diterima lagi berdasarkan

¹¹ Rudianto, Akuntansi Manajemen : Pengantar untuk pengambilan keputusan (Jakarta: Erlangga. 2013) h. 75

periode yang sudah ditetapkan. Dalam anggaran pemerintah, unsur ini bertujuan sebagai penutup defisit. Pembiayaan antara lain dapat berasal dari kredit dan hasil divestasi sedang pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman, pemberian kredit pada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

c. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan banyak informasi terkait pendapatan, transfer, belanja, defisit, surplus, serta pembiayaan pada suatu entitas. Informasi ini nantinya bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi berbagai jenis pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.¹² Antara lain meliputi pengalokasian sumber daya ekonomi, ketaatan entitas pelaporan pada anggaran, dan akuntabilitas. Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa laporan realisasi anggaran memiliki sejumlah manfaat, antara lain:

- 1) Menyajikan informasi mengenai alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi.
 - 2) Bisa dipakai untuk memprediksi sumber daya ekonomi untuk pendanaan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode berikutnya.
 - 3) Dengan adanya data laporan tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi oleh pihak pengguna laporan terhadap keputusan yang akan dibuat.
- Dimana keputusan tersebut diambil ketika akan menggunakan sumber daya

¹² Rudianto, Akuntansi Manajemen : Pengantar untuk pengambilan keputusan (Jakarta: Erlangga. 2013) h. 74.

ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan dalam entitas pelaporan agar proses pengelolaan uang berjalan dengan lancar.

- 4) Hadirnya laporan realisasi dana tersebut memberikan rincian terhadap catatan kondisi keuangan secara menyeluruh. Sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi paling akurat untuk mengetahui efektifitas perolehan pendapatan dan realisasi dari sumber daya ekonomi.
- 5) Laporan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membandingkan pendapatan dari pemakaian anggaran apakah sudah sesuai dengan peraturan UU atau belum. Laporan ini bermanfaat untuk mengambil keputusan soal alokasi sumber daya ekonomi lengkap dengan akuntabilitasnya pada periode mendatang.

Perlu diketahui, laporan realisasi anggaran juga dapat menyajikan informasi terkait berbagai perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang sudah dilaksanakan, apakah pemakaian tersebut efektif, efisien, hemat serta sesuai dengan anggaran dan peraturan dalam undang-undang atau tidak¹³.

4. Dana Desa

Dana desa dijadikan sumber pemasukan di setiap desa, sebab dengan adanya dana desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengetahuan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan

¹³Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), h. 392.

permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa.

Berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Melalui UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa, sesungguhnya desa memperoleh kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa¹⁴.

Kajian KPK terhadap pengelolaan dana desa juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi, dimana dalam pengelolaan dana desa mempunyai kelemahan empat aspek, yakni regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa. yang dimana disebutkan dalam surat Al-Qashash yang menjelaskan bahwa kejujuran sangat penting dalam pelaporan realisasi anggaran :

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ تَأْتِيهِمْ نَافِعٌ مِّنْ خَيْرِ مَا هُمْ بِأَعْيُنِهِمْ إِذْ يَخْتَصِرُونَ
الْأَمِينُ الْقَوِيُّ تَأْتِيهِمْ نَافِعٌ مِّنْ خَيْرِ مَا هُمْ بِأَعْيُنِهِمْ إِذْ يَخْتَصِرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya”“(QS. Al-Qashash Ayat 26).¹⁵

¹⁴ Heru Cahyono, Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa, (Jakarta, 2020), h. 7.

¹⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-qashash, 2012), h. 388

Hadis diatas menjelaskan bahwa kejujuran dalam islam sangat penting karena sebagai pekerja yang memiliki kemampuan dan terpercaya maka transparansi adalah sistem dimana menjadi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun.¹⁶

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana disebutkan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun

¹⁶David Wijaya, Akuntansi Desa, (Yogyakarta, 2018), h. 62.

masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.

Desa Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengkali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

b. Tujuan Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sementara itu tujuan alokasi Dana Desa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT,RW, PKK, Karang Taruna, dan Limnas.

c. Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, meliputi:

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi:
 - a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
 - b) Pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan
 - c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa.
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani.
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa.
 - d) Pembangunan energi baru dan terbarukan.
 - e) Pembenuan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
- 3) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan potensi ekonomi lokak guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pembangunan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

d. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang.

Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);

- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

e. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

1) Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

2) Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

3) Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan

Bupati/Walikota.Persetujuan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

4) Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5) Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 1) semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan 2) semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri in.

f. Alokasi Dana Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan amanat Undang-undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa Plaing sedikit 10%”.¹⁷Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan melalui peraturanBupati/ Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.¹⁸ Pengalokasian ADD kepada setiap desa pasti mempertimbangkan:

- 1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa.
- 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, serta tingkat kesulitan geografis desa.

Angka kemiskinan, jumlah penduduk, serta luas wilayah dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/ kota.
- 2) 20% untuk luas wilayah kabupaten/ kota.
- 3) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/ kota.

¹⁷Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), h. 392.

¹⁸David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta, 2018), h. 63.

Tingkat kesulitan geografis dapat ditunjukkan melalui indeks kemahalan konstruksi. Sesuai dana desa disetiap kabupaten/ kota, Bupati/ Walikota menetapkan besaran dana desa setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa untuk setiap desa dapat ditetapkan melalui peraturan Bupati/ Walikota. Kabupaten/ Kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa sesuai jumlah penduduk desa, luas wilayah, desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk desa.
- 2) 20% untuk luas wilayah desa.
- 3) 50% untuk angka kemiskinan desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Di dalam proses penganggaran desa, Bupati/ Walikota akan menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati Kepala Desa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

5. Teori Akuntansi Syariah

Teori Akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist, dan pemahaman yang baik tentang teori akuntansi mendukung perkembangan akuntansi menjadi praktik yang baik.

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Rudianto, Akuntansi adalah tindakan mengumpulkan, menganalisis,

menyajikan, mengklasifikasikan, mengumpulkan, mencatat dan melaporkan kegiatan atau urusan organisasi bisnis dalam bentuk informasi keuangan.¹⁹

Syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia.

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Perkembangan pesat dimulai dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dsb). Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah.²⁰

Toshikabu Hayashi berpendapat bahwa, akuntansi islam adalah akuntansi berdasarkan konsep syariah, yang berasal dari Tuhan dan bukan dari manusia. Akuntansi Syariah menuntut perusahaan untuk bersikap etis, bertanggung jawab secara sosial dan bahkan bertanggung jawab atas akhirat, dan bahkan setiap orang bertanggung jawab atas semua tindakannya di dunia ini.²¹

b. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

1. Prinsip pertanggungjawaban (*Accountability*), tanggung jawab tidak terlepas dari pengertian kepercayaan. Dalam islam, masalah imam adalah interaksi manusia dengan Sang Pencipta sejak dalam kandungan. Manusia

¹⁹ Yayah Pudir Shatu, *Kuasai Detail Akuntansi Laba & Rugi*, (Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta, 2016), h.9.

²⁰ Evi Grediani, S.E., M.Sc., Ak, C.A., SAS, *Akuntansi Syariah Pengantar*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), h.1.

²¹ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Guepedia, 2009), h.8.

diperintahkan oleh Allah SWT. Selalu menggunakan peran khalifah untuk tanah ini. Implikasi dari bisnis dan akuntansi adalah bahwa orang-orang yang terlibat dalam bisnis harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka izinkan dan dilakukan oleh orang-orang yang terlibat.²²

2. Prinsip keadilan, prinsip keadilan tidak saja penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Kata akuntansi dalam konteks aplikasi akuntansi merupakan pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.²³
3. Prinsip kebenaran, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi, kita selalu dihadapkan pada masalah validasi, evaluasi laporan. Tindakan ini bisa efektif jika dilandasi dengan nilai kebenaran.

C. Tinjauan Konseptual

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

²² Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah*, h.17.

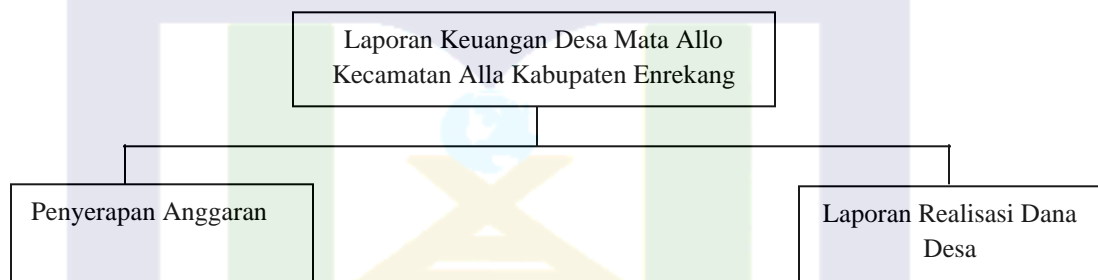
²³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h.11.

periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, Transfer, dan Pembiayaan.²⁴

2. Dana Desa

Dana desa merupakan sumber daya Finansial desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dana desa digunakan untuk membangun ekonomi desa sampai ke pelosok.²⁵

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

²⁴ Halkadri Fitra, *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, (Malang: CV IRDH, 2019), h.36.

²⁵ Maryunani, *Ekonomi Perdesaan*, (Malang: Tim UB Press, 2020), h.86.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, dimana penelitian ini dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan. Seluruh data diambil dari proses pengumpulan data di lapangan di Kantor Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Data yang diperoleh tersebut merupakan data yang berhubungan dengan subjek penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni laporan realisasi anggaran dana desa terhadap kinerja keuangan yang ada di lokasi penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dalam penelitian ini peneliti berusaha membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memperoleh data kuantitatif atau data kualitatif dalam bentuk numerik. Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

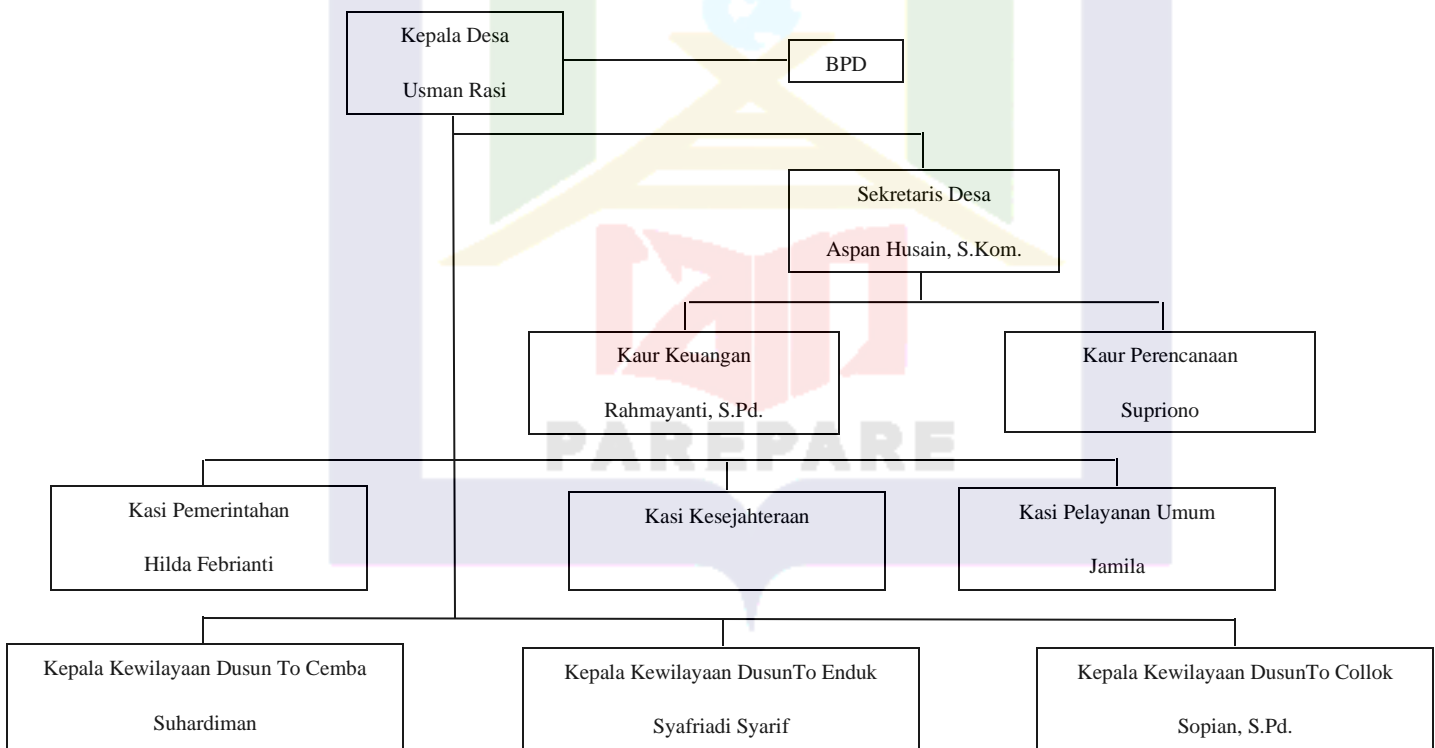
Penelitian ini akan memungkinkan untuk mengembangkan teori yang dapat menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan gejala. Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah gabungan klausa.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan yang digunakan untuk mendapatkan pemecahan masalah dari penelitian berlangsung.

1. Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang. Tepatnya Kantor Desa Mata Allo berada di tengah-tengah ketiga dusun yakni berada di Dusun To' Enduk. Berikut struktur Organisasi Desa Mata Allo:



²⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, n.d., 30.

2. Waktu

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih satu bulan (30 hari), dimana penelitian akan dilakukan setelah melaksanakan seminar proposal.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek penelitian. Populasi adalah domain umum yang terdiri dari sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menunjukkan karakteristik tertentu.²⁸ Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan item yang berhubungan dengan apa yang diharapkan peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Definisi Kuncoro tentang populasi adalah sekumpulan elemen yang lengkap, biasanya orang, benda, transaksi, atau peristiwa yang kita pelajari atau menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, populasi tidak hanya terdiri dari orang-orang, tetapi juga benda-benda dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, populasi tidak hanya mencakup jumlah objek atau subjek yang diselidiki, tetapi juga semua karakteristik atau karakteristik yang dimiliki subjek atau subjek. Penelitian ini dilakukan mengetahui bentuk penyaluran dan penyerapan anggaran dana desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tahun 2021 dan sistem penyajian laporan keuangan realisasi dana desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tahun 2021.²⁹ Karena subjek penelitian ini adalah Laporan keuangan Anggaran di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, maka populasi penelitian ini adalah jumlah Laporan keuangan Anggaran yang termasuk dalam laporan realisasi anggaran periode 2021.

²⁸Arfan, *Metologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Mnajemen* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 105.

²⁹Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), 103.

2. Sampel

Sampel adalah teknik pengumpulan data dimana hanya sebagian dari populasi yang diambil dan digunakan untuk menentukan sifat dan karakteristik populasi yang diinginkan.³⁰ Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran periode 2021.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan digabungkan dengan penelitian sebelumnya yang diterbitkan oleh organisasi lain dan bersifat tidak langsung seperti: bentuk dokumen atau data lainnya.³¹ Karena merupakan data sekunder, maka digunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis arsip atau catatan yang berkaitan dengan penelitian.³² Data Primer adalah segala sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau pihak pertama dengan hubungan langsung (kontak) yang secara alamiah ada antara peneliti pada saat pengumpulan data primer dan data sekunder yang dilakukan di desa mata allo kecamatan alla kabupaten enrekang.³³

³⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, 30.

³¹ Firdaus Hamka, *Metode Penelitian Akuntansi*, n.d., 76.

³² Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Medan: Cita Pustaka Medan Perintis, 2000), 102.

³³ Arfan Ikhsan dan Misri, *Metologi Penelitian* (Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), 166.

1. Data sekunder

Data sekunde adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data berupa data kuantitatif yang dikeluarkan pemerintah desa mata allo. Yaitu data yang diperoleh berupa informasi tertulis dan dokumentasi serta laporan-laporan keuangan.

Data-data yang ingin diperoleh pada penelitian ini yaitu:

- a. Laporan Keuangan Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
- b. Laporan Realisasi Anggaran Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. .

2. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau pihak pertama pada saat pengumpulan Data Primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal langsung dari salah satu staf desa yang berkualitas dan sumber data untuk penelitian ini adalah Kantor desa Mata Allo. Ini adalah laporan keuangan tahunan desa mata allo.

E. Instrument Penelitian

Instrument atau alat penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, yang memudahkan dan meningkatkan penelitian dalam arti lebih akurat, lebih lengkap, dan lebih sistematis, serta dapat diolah lebih mudah. Instrumen investigasi dimaksudkan untuk mendukung proses pengumpulan dan pengambilan data berupa laporan keuangan.³⁴

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 203.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Statistik adalah kumpulan data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau daftar.

Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk melakukan analisis data, dan analisis data untuk penelitian ini merupakan bagian dari proses telaah data setelah tahap seleksi dan pengumpulan data penelitian. Beberapa teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Uji Deskriptif Data

Uji analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang data, statistik dan lain-lain. Digunakan untuk mengetahui berapa rata-rata data yang akan diteliti, berapa nilai maksimum dan minimumnya, serta untuk mengetahui berapa standar deviasi dari data yang akan diteliti.

2. Pengelompokan Data

Deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya.

3. Penjabaran Angka

Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkannya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber melalui proses

observasi, secara langsung dan studi dokumenter secara langsung serta sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya.³⁵



³⁵ Rahayu, R. P. *Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah*. (Surabaya : Pustaka Indo, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini terkait dengan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan ialah dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja dan laporan keuangan yang digunakan selama tahun 2021 sebagai dasar dari pengumpulan data pada penelitian ini.

Tahapan awal penelitian ini, peneliti mendeskripsikan lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Enrekang yang disebut juga dengan 'MASSENREMPULU' yang berarti meminggir gunung atau disebut juga dengan menyusuri gunung, sedangkan sebutan Enrekang berasal dari bahasa ENDEG yang berarti panjat, itulah yang menjadi asal mula dari kata ENDEKAN. Dalam pengertian umum yang sampai saat ini masih ada yang bahkan dalam Administrasi Pemerintahan dikenal dengan nama "ENREKANG" dalam versi Bugis, Daerah Kabupaten Enrekang sering disebut sebagai daerah pegunungan karena terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang sambung menyambung mengambil ±84,96% sedangkan yang datar hanya 15,04% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km².

Penelitian yang dilakukan secara spesifik di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, Desa ini terletak secara spesifik di Kabupaten Enrekang, Secara khusus Desa ini berada di Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, Kelurahan Galonta itu sendiri terbagi atas 3

lingkungan yaitu: lingkungan Keppe, lingkungan Batili Luar dan lingkungan Batili dalam dan Mata allo itu berada di jalan Pancaitanya Bunga Walie tepatnya pertengahan lingkungan Keppe dan Batili Luar . Kabupaten Enrekang.

Kondisi Desa dari aspek sumber daya alam terdapat sejumlah fasilitas, seperti 12 ruang baca, satu ruang pameran, satu surau, taman film, 12 spot foto mewakili masing-masing kecamatan, serta taman bermain anak. Di bagian tengah anjungan wisata itu kita akan melihat tulisan Enrekang, Sulsel dengan tulisan latar di belakang 'INDONESIA' yang cukup besar dan sangat indah. Jika kita lihat sepintas, salah satu wisata yang terdapat di Desa ini ialah Sungai Mata Allo hampir mirip dengan anjungan Losari. Revitalisasi anjungan Sungai Mata Allo di harapkan itu nanti akan menjadi ikon Kabupaten Enrekang dan tempat foto-foto dan tempat rekreasi keluarga. Anjungan ini nantinya akan menjadi sarana publik di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Lokasi peneltian ini secara umu berada di Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar. Secara georafis Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara $3^{\circ} 50' 00''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 40' 53''$ sampai $120^{\circ} 06' 33''$ Bujur Timur. Secara administratif, kabupaten Enrekang juga terdiri dari 12 kecamatan, 112 desa dan 7 kelurahan.

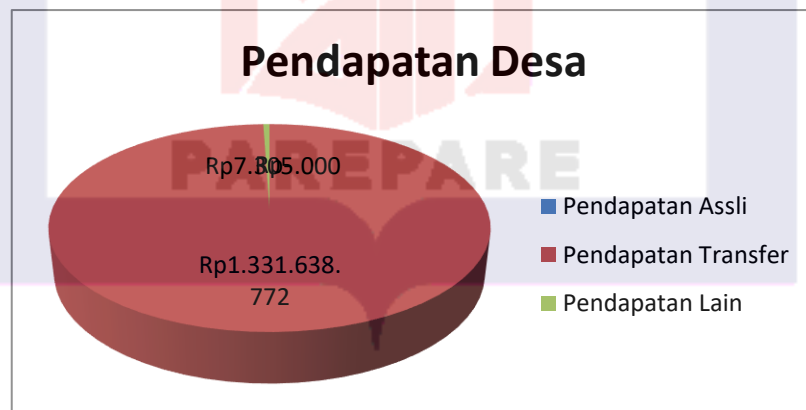
Penjelasan diatas, beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan mengunjungi desa sebagai objek kajian peneltian ini dengan merumuskan pertanyaan pada pendahuluan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021

Penelitian rumusan masalah pertama ialah terkait dengan bentuk penyerapan anggaran Dana Desa Mata Allo kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 menunjukkan beberapa sub kebijakan yang dilakuakan dalam rangka penyaluran dan penyerapan anggaran desa.

Laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 dimana menunjukkan jumlah pendapatan yang berasal dari beberapa sub pendapatan diantaranya yaitu dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 0-, pendapatan transfer sebesar Rp. 1,331,638,772.-, pendapatan lain lain berjumlah Rp. 7.305.000,-. Dengan jumlah total pendapatan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,338,943,772. Berikut diagram penjabaran alokasi pendapatan desa tahun 2021.

Gambar 4.1 Diagram Pendapatan Desa Tahun 2021



Penjabaran anggaran pendapatan diatas, maka peneliti kemudian menjabarkan beberapa bentuk penyaluran dan penyerapan anggaran yang dapat dijabarkan pada beberapa sub berikut ini:

- a) Penyerapan Anggaran Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2021

Pada bidang pertama dalam laporan anggaran Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 menunjukkan bidang anggaran penyelenggaraan pemerintah Desa yang dengan dana penyaluran sebesar Rp. 441,397,546 dengan rincian anggaran dan sub-sub anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Anggaran Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 472,749,483	Rp 441,397,546	Rp 31,351,937
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan	Rp 402,102,772	Rp 383,521,639	Rp 18,581,133
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 66,000,000	Rp 66,000,000	Rp -
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 219,225,000	Rp 209,100,000	Rp 10,125,000
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 16,824,888	Rp 16,476,639	Rp 348,249

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp72,277,884	Rp 64,170,000	Rp 8,107,884
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp 18,000,000	Rp 18,000,000	Rp -
Penyediaan Operasional BPD	Rp 5.575,000	Rp 5,575,000	Rp -
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp 4,200,000	Rp 4,200,000	Rp -

Penjabaran realisasi dan hasil pengalokasian anggaran pada table diatas bahwa total anggaran yang direncanakan ialah sebesar 472,749,483 dengan realisasi anggaran 441,397,546 sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dan realisasi penyaluran sebesar 31,351,937.

b) Penyerapan Anggaran Bidang Pembangunan Desa (Sarana) tahun 2021

Pada bidang kedua dalam penyalurannya dalam laporan anggaran Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 menunjukkan bidang Pembangunan Desa dengan dana penyaluran sebesar Rp. 6.081.000 dengan rincian anggaran dan sub-sub anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi Anggaran Bidang Pembangunan Desa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp 18,744,211	Rp 6,081,000	Rp 12,663,211
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp 12,612,249	Rp -	Rp 12,612,249
Rehabilitasi Kantor Desa	Rp 6,131,962	Rp 6,081,000	Rp 50,962

Penjabaran realisasi dan hasil pengalokasian anggaran pada table diatas bahwa total anggaran yang direncanakan ialah sebesar 18,744,211 dengan realisasi anggaran 6,081,000 sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dan realisasi penyaluran sebesar 12,663,211.

- c) Penyerapan Anggaran Bidang Administrasi dan Praja Pemerintah tahun 2021
- Pada bidang kedua dalam penyalurannya dalam laporan anggaran Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 menunjukkan bidang Administrasi dan Praja Pemerintah dengan dana penyaluran sebesar Rp. 28.287.500 dengan rincian anggaran dan sub-sub anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.3 Deskripsi Anggaran Bidang Administrasi dan Praja Pemerintah tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
Sud Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Statistik dan Kearsipan	Rp 28,287,500	Rp 28,287,500	Rp -
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Rp 28,287,500	Rp 28,287,500	Rp -
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	Rp 22,177,000	Rp 22,177,000	Rp -
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp 10,742,000	Rp 10,742,000	Rp -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 2,580,000	Rp 2,580,000	Rp -

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 8,855,000	Rp 8,855,000	Rp -
----------------------------------	--------------	--------------	------

Penjabaran realisasi dan hasil pengalokasian anggaran pada table diatas bahwa total anggaran yang direncanakan ialah sebesar 28,287,500 dengan realisasi anggaran 28,287,500 sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dan realisasi penyaluran sebesar 0.

d) Penyerapan Anggaran Bidang Pembangunan Desa tahun 2021

Pada bidang keempat dalam penyalurannya dalam laporan anggaran Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 menunjukkan bidang pembangunan desa dengan dana penyaluran sebesar Rp. 770,681,250 dengan rincian anggaran dan sub-sub anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.4 Anggaran Bidang Pembangunan Desa tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 852,883,875	Rp 770,681,250	Rp 82,202,625
Sub Bidang Pendidikan	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp -
Sub Bidang Kesehatan	Rp 540,000	Rp 79,250,000	Rp 56,290,000
Rehabilitasi Sarana Posyandu	Rp 16,207,000	Rp 15,686,000	Rp 521,000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 569,230,500	Rp 543,643,250	Rp 2,587,250
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Rp 502,282,500	Rp 477,840,250	Rp 24,442,250
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Rp 66,948,000	Rp 65,803,000	Rp 1,145,000
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 144,313,375	Rp 143,988,000	Rp 325,375
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp -

Penjabaran realisasi dan hasil pengalokasian anggaran pada table diatas bahwa total anggaran yang direncanakan ialah sebesar 852,883,875 dengan realisasi anggaran 770,681,250 sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dan realisasi penyaluran sebesar 82,202,625.

- e) Penyerapan Anggaran Bidang Kemasyarakatan, pemberdayaan dan dana darurat tahun 2021

Bidang keempat dalam penyalurannya dalam laporan anggaran Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 menunjukkan bidang pembangunana desa dengan dana penyaluran sebesar Rp. 770,681,250 dengan rincian anggaran dan sub-sub anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.5 Anggaran Bidang Kemasyarakatan, pemberdayaan dan dana darurat Desa tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 33,109,000	Rp 28,980,000	Rp 4,129,000
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 7,040,000	Rp 3,240,000	Rp3,800,000
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana	Rp 3,240,000	Rp 3,240,000	Rp -
Skala Lokal Desa			
Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 3,800,000	Rp -	Rp 3,800,000
Sub Bidang Kebudayaan dan	Rp 15,919,000	Rp 15,800,000	Rp 119,000

Keagamaan			
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Rp 15,919,000	Rp 15,800,000	Rp 119,000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 10,150,000	Rp 9,940,000	Rp 210,000
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 50,000
Pembinaan PKK	Rp 8,950,000	Rp 8,790,000	Rp 160,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 9,084,552	Rp 8,911,000	Rp 173,552
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 570,000	Rp 1,570,000	Rp -
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 1,570,000	Rp 1,570,000	Rp -
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp ,514,552	Rp 7,341,000	Rp 173,552
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Rp 7,514,552	Rp ,341,000	Rp 173,552
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp 67,500,000	Rp 60,000,000	Rp 7,500,000
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp 76,500,000	Rp 60,000,000	Rp 7,500,000
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Rp 67,500,000	Rp 60,000,000	Rp 7,500,000

Penjabaran realisasi dan hasil pengalokasian anggaran bidang kemasyarakatan pada tabel diatas bahwa total anggaran yang direncanakan ialah sebesar 33,109,000 dengan realisasi anggaran 28,980,000 sehingga

terdapat selisih penggunaan anggaran dan realisasi penyaluran sebesar 4,129,000.

Bidang pemberdayaan menjelaskan bahwa total anggaran yang direncanakan ialah sebesar 9,084,552 dengan realisasi anggaran 8,911,000 sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dan realisasi penyaluran sebesar 173,552. Sedangkan pada bidang dana darurat bahwa total anggaran yang direncanakan ialah sebesar 67,500,000 dengan realisasi anggaran 60,000,000 sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dan realisasi penyaluran sebesar 7,500,000.

Seluruh penjabaran hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penyaluran dan Penyerapan Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 dilakukan kedalam beberapa bidang penyaluran diantaranya yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa (Sarana) , Bidang Administrasi dan Praja Pemerintah, bidang Pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan dan dana darurat dengan jumlah dana anggaran 109,693,552 dengan realisasi 97,891,000 dan selisih anggaran 11,802,552.

2. Sistem Penyajian Laporan Keuangan Realisasi Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021

Hasil penelitian kedua pada rumusan masalah ini yaitu berkaitan dengan sistem penyajian laporan keuangan realisasi dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021,

Sistem penyajian yang menjadi rujukan dari rumusan permasalahan kedua ialah merujuk pada bagaimana pengelolah dan penyusunan laporan Keuangan Realisasi Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 dilakukan dengan menyajikan beberapa hal dibawah ini:

- a) Sistem penyajian Laporan Keuangan Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021.

Sistem penyajian laporan keuangan dapat dikategorikan berdasarkan sub-sub pembahasan yang dicantumkan dalam laporan keuangan suatu desa, pada desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, deskripsi tabel laporan keuangan yang diberikan mencakup beberapa hal dibawah ini:

Tabel 4.6 Deskripsi Format penyajian Laporan Keuangan Desa tahun 2021

KODE REKENING		URAIAN	Rindian Perhitungan			ANGGARAN	SUMBER DANA
			Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
-	4	Pendapatan	1	Tahun	Rp. 834,776,000	Rp. 834776000	DBH

Deskripsi tabel format penyajian yang dipaparkan peneltii diatas maka dapat dikategorikan bahwa system penyajian yang digunakan ialah system penyajian laporan keuangan berbentuk Kas.

Sistem penyajian laporan akuntansi pada dana anggaran Desa, Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 dalam Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa tersebut saat ini masih menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan

penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dijabarkan pada hasil penelitian rumusan masalah pertama.

Merujuk pada hasil peneltiian tersebut bahwa *system* yang digunakan ialah *system* kas dimana tata cara penyajian dimulai dari pendapatan yang dilakukan:

a) Penyajian Pendapatan Anggaran

Penyajian pendapatan anggaran yang dimaksudkan dalam penyajian laporan keuangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Penjabaran Pendapatan Anggaran Desa tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	Realisasi s.d 31/12/2021		SUMBE
		REALISASI	LEBIH/(KURANG)	R DANA
2	3	4	5	6
PENDAPATAN				
PENDAPATAN TRANSFER	Rp.1,401,949,693	Rp ,384,378,847	Rp. 17,570,846	-
Dana Desa	Rp 919,088,000	Rp 919,088,000	-	DDS
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 33,446,693	Rp 15,875,847	-	DBH
Alokasi Dana Desa	Rp 449,415,000	Rp 449,415,000	-	ADD
Pendapatan Lain-Lain	Rp 3,200,000	Rp 7,305,429	Rp (4,105,429)	

Penjabaran penyajian pendapatan anggaran diatas bahwa secara spesifik pelaporan penyajian yang di tunjukkan pada Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang menggunakan *system* berbasisi Kas.

b) Penyajian Jumlah Pembiayaan

Penyajian pembiayaan anggaran yang dimaksudkan dalam penyajian laporan keuangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Penjabaran Jumlah Pembiayaan keuangan Desa tahun 2021

PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	SUMBER DANA
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp 30,177,217	Rp 30,177,217	-	
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 30,177,217	Rp 30,177,217	-	
Penyertan Modal Desa	-	-	-	
JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp 30,177,217	Rp 30,177,217	-	
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp -	Rp 111,891,697	Rp 111,891,697	

Penjabaran penyajian pendapatan anggaran diatas bahwa secara spesifik pelaporan penyajian yang di tunjukkan pada Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang menggunakan *system* berbasisi Kas dimana penjelasan laporan mendeskripsikan 3 aspek didalamnya yaitu anggaran, realisasi dan selisih serta sumber dana yang diperoleh.

Penjelasan dan penjabaran dua aspek penyajian yang dilakukan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam melaporkan keuangan Desa maka dapat disimpulkna bahawa *system* penyajian keuangan sebagai laporan keuangan yang dilakukan merujuk pada laporan keuangan dengan *system* Kas. Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun

2021 menggunakan sistem basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini merujuk pada rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berkaitan dengan bentuk penyaluran dan penyerapan anggaran serta system penyajian laporan yang dilakukan.

1. Bentuk Penyaluran dan Penyerapan Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 yang dilakukan di Desa merujuk pada beberapa bidang penyaluran diantaranya yaitu dilakukan kedalam beberapa bidang penyaluran diantaranya yaitu penyaluran anggaran pada bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa (Sarana) , Bidang Administrasi dan Praja Pemerintah, bidang Pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan dan dana darurat dengan jumlah dana anggaran 109,693,552 dengan realisasi 97,891,000 dan selisih anggaran 11,802,552, berdasarkan hal tersebut maka penyaluran anggaran dengan alokasi penyerapan berjumlah 90% telah tersalurkan dan selisih alokasi sebesar 10% sebagai selisih atau sisa dari rencana anggaran yang dilakukan.

Penejelasan tersebut maka penelit mendeskripsikan terkait dengan penyaluran dana yang dilakukan lebih kepada dana pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang bahkan mencapai dana dengan jumlah Rp. 474, 749,483 yang dikategorikan sebagai dana anggaran yang

tergolong tinggi, penyaluran dana pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa menjadi yang paling besar dikarenakan sub sub bagian dan a tersebut dikategorikan sebagai pengeluaran anggaran yang wajib dilakukan.

Seluruh akses masyarakat desa yang dilakukan menggunakan anggaran pada bidang tersebut, penyediaan operasional desa menjadi salah satu sub indikator pada bidang tersebut, beberapa hal lainnya termasuk pada penyediaan tunjangan BPD dan beberapa insentif operasional yang diberikan, namun secara analisis peneliti, beberapa sub anggaran yang dilakukan sub anggaran pada bidang fasilitas prasarana pemerintah desa juga menjadi hal yang penting.

Penyaluran lainnya pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan desa yang diperoleh tersebut merupakan peningkatan mutu khususnya pada cakupan pendidikan untuk pengelolaan perpustakaan milik desa misalnya, serta beberapa bidang kesehatan yang juga sangat penting, bidang kesehatan diantaranya yaitu penyelenggaraan Posyandu, pelatihan Bidang kesehatan dan desa siaga kesehatan yang dilakukan, berkaitan dengan hal tersebut maka tentu menjadi sangat penting bagi peningkatan kesehatan masyarakat Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Merujuk pada beberapa penelitian lainnya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasrul D. dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa analisis penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan

pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data mengenai penyajian laporan dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif-kuantitatif serta referensi buku yang relevan dengan permasalahan. Data-data yang terkumpul berupa data yang bersifat kualitatif-kuantitatif sehingga diolah menjadi data yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2015, Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara di dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.³⁶ Penyajian tersebut senada dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa laporan yang digunakan sebagai acuan pelaporan realisasi anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan lainnya bahwa sesuai dengan definisi dasar terkait dengan laporan realisasi anggaran yang juga merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya³⁷. Dengan kata lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan

³⁶ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Republik Indonesia, 2019).

³⁷Halkadri Fitra, Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah, (Purwokerto, 2019), h. 36.

tersebut akan membuat informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menjadi salah satu fungsi dari ketelitian dalam penyusunan anggaran yang juga dirasakan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, seluruh aspek haruslah dijabarkan secara terperinci dalam pelaporan tersebut.

2. Sistem Penyajian Laporan Keuangan Realisasi Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 terdapat tiga aspek penyajian yang dilakukan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam melaporkan keuangan Desa yaitu aspek penyajian laporan keuangan berkaitan dengan pendapat, serta penyajian laporan keuangan merujuk pada aspek belanja dan pembiayaan yang dilakukan, seluruh penyajian tersebut disimpulkan bahwa sistem penyajian keuangan sebagai laporan keuangan yang dilakukan merujuk pada laporan keuangan dengan

sistem Kas. Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 menggunakan sistem basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggarannya.

Sistem penyajian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan *system* kas, Hal ini karena proses pembukuan yang sederhana sehingga untuk melacak uang masuk dan keluar dari rekening bank cukup mudah, jika menganalisis secara mendalam terkait dengan penggunaan *system* berbasis kas pemerintah Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang karena tidak tercampur oleh pencatatan hutang piutang.

Hasil penelitian bahwa UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pencatatan transaksi keuangan masih menggunakan pencatatan tunggal/*single entry* dengan basis kas.³⁸ Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas. Akuntansi berbasis kas memiliki keunggulan, yaitu lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan. Akan tetapi, akuntansi berbasis kas kurang informatif karena hanya menyajikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas.

Laporan keuangan berdasarkan hal tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mengikuti UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara namun terdapat beberapa kelemahan yang dimana pemerintah saat ini tidak memiliki catatan yang memadai tentang posisi keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas) dan perubahannya. Akibatnya,

³⁸ D Hendianto, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Jakarta: 2008).

pengelolaan keuangan negara tidak dilakukan secara efektif dan efisien. Secara hasil penelitian, jumlah utang yang diperoleh oleh Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tidak dicantumkan dalam pelaporan keuangan yang peneliti terima sebagai bahan penelitian.

Seluruh penjelasan diatas bahwa kurangnya informasi tentang utang pemerintah mempersulit manajemen utang, termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Selain itu, tidak adanya pemisahan kas untuk belanja operasional dan belanja modal memungkinkan terjadinya pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai belanja operasional hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari digunakannya system berbasisi kas.

Laporan berbentuk *system* Kas ini juga di kaitkan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Melalui UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa.³⁹ Sesungguhnya desa memperoleh kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa serta pelaporan keuangan tiap tahunnya.

Relevansi dari penggunaan system pelaporan keuangan yang dilakukan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang bahwa berdasarkan

³⁹ Amir Syamsudin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Jakarta: 2014).

PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pasal 1 ayat (1), laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 1, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam PSAP nomor 1. PSAP nomor 1 bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar anggaran, antar periode, dan antar entitas. Berkaitan dengan penjelasan tersebut maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan, ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga berperan prediktif dan prospektif, yaitu menyediakan informasi untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan dari operasi berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Penjelasan hasil penelitian ini, maka peneliti yang dilakukan oleh RUSDI, yaitu Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Pada Pemerintah Daerah Kab.Enrekang, Hasil dari penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target namun termasuk dalam kategori efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal ini terlihat dari tidak adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan. Hasil peneltiian tersebut sejalan dengan peneltian ini dimana hasil merujuk pada tingkat realisasi anggaran mencapai 90% yang artinya realisasi anggaran sangat efektif.

Penjelasan diatas mendeskripsikan bahwa penyajian laporan keuangan yang berbasis *system* Kas menjadi acuan yang lebih sederhana, penggunaan system tersebut telah dilakukan sejak di berlakukannya aturan yang tertuang dalam PSAP yang berlaku, walaupun beberapa hambatan dirasakan dengan digunakannya *system* kas diantara yaitu sulitnya pembukuan yang dilakukans ecara umum sehingga terdapat beberapa laporan kecil lainnya yang menyempurnakan informasi informasi didalam laporan tersebut.

Berdasarkan seluruh hasil peneltiian yang ditemukan pada hasil penelitian ini dimana peneliti mengaitkan hasil penelitian ini dengan prinsip prinsip akuntasni syariah sebagai rujukan disiplin ilmu akuntansi syariah merujuk pada prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban, secara konsep bahwa bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang

meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu instansi. Secara hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengelolaan dana Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang telah dikategorikan sebagai laporan yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dengan bukti seluruh rekap pengalokasian dana dilakukan dengan jelas.

Berdasarkan kajian prinsip akuntansi syariah bahwa Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan akuntansi. Bentuk amanah yang dilakukan oleh Desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang menunjukkan bentuk amanah yang sangat baik ditunjukkan pada peningkatan mutu desa.

Prinsip kedua dalam akuntansi syariah yaitu prinsip keadilan, Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya

memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Implementasi unsur keadilan pada realisasi anggaran di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dimana konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat AlBaqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar. Hal tersebut diimplementasikan oleh seluruh pegawai dan perangkat desa dimana seluruh transaksi di tuliskan secara akurat dengan akurat sehingga prinsip adil telah diimplementasikan oleh seluruh perangkat Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran selalu menjadi fokus kajian selama akuntansi syariah, salah satu bentuk implementasi prinsip kebenaran dalam realisasi anggaran di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yaitu jika dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat diciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi secara rinci dan transparan.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang bahwa realisasi yang dilaporkan telah sesuai dan berdasarkan pada prinsip kebenaran dibuktikan dari laporan realisasi anggaran yang cermat dan jelas serta alur – realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian terkait dengan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan penelitian ini ialah:

1. Penyerapan Anggaran Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 yaitu penyaluran kedalam beberapa bidang diantaranya penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa (Sarana) , Bidang Administrasi dan Praja Pemerintah, bidang Pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan dan dana darurat dengan jumlah dana anggaran 109,693,552 dengan realisasi 97,891,000 dan selisih anggaran 11,802,552, penyaluran anggaran dengan alokasi penyerapan berjumlah 90% telah tersalurkan dan selisih alokasi sebesar 10% sisa dari rencana anggaran yang disalurkan.
2. Sistem Penyajian Laporan Keuangan Realisasi Dana Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Tahun 2021 merujuk pada tiga aspek penyajian yang dilakukan di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam melaporkan keuangan Desa yaitu aspek penyajian laporan keuangan berkaitan dengan pendapatan, keuangan merujuk pada aspek belanja dan pembiayaan maka sistem penyajian keuangan menggunakan sistem Kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggarannya.

B. Saran

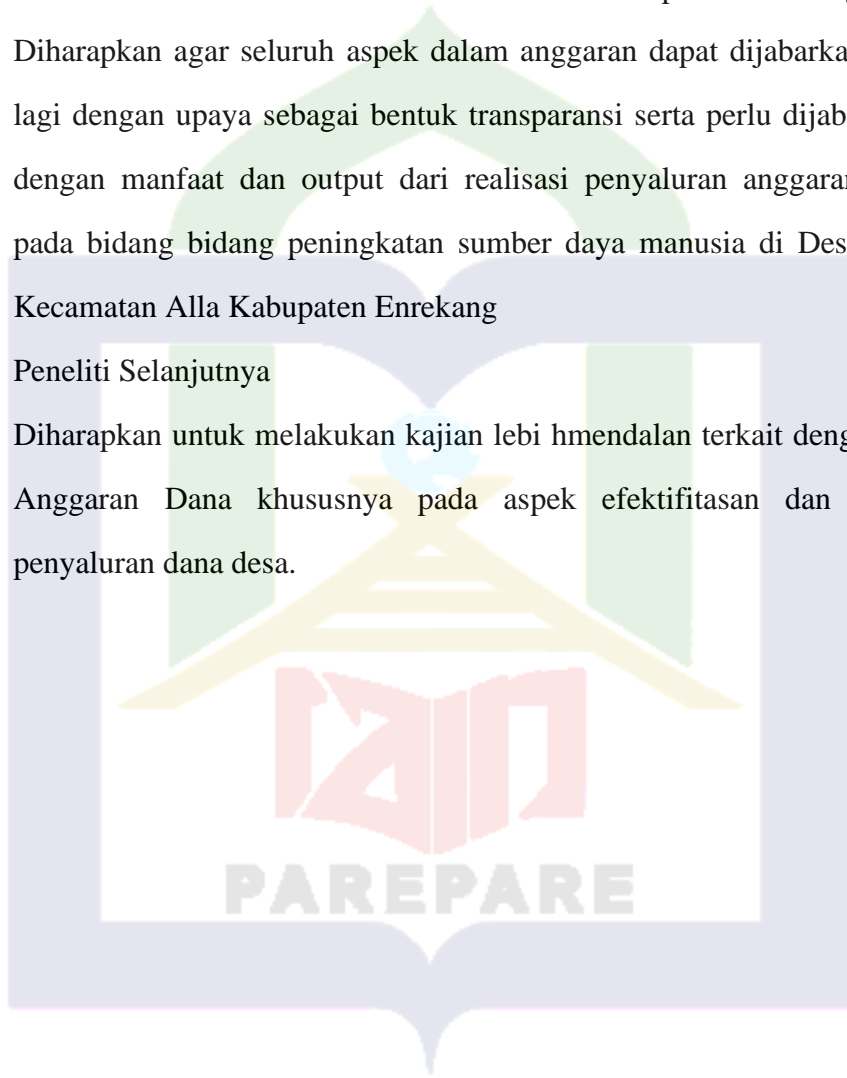
Simpulan penelitian diatas bahwa beberapa saran diajukan kepada beberapa pihak yaitu kepada:

1. Pemerintah Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Diharapkan agar seluruh aspek dalam anggaran dapat dijabarkan lebih rinci lagi dengan upaya sebagai bentuk transparansi serta perlu dijabarkan terkait dengan manfaat dan output dari realisasi penyaluran anggaran khususnya pada bidang bidang peningkatan sumber daya manusia di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan kajian lebi hmendalan terkait dengan Realisasi Anggaran Dana khususnya pada aspek efektifitasan dan transparansi penyaluran dana desa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arfiansyah, M.A. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Journal Of Islamic Finance And Accounting*, Vol.3, No.1, Tahun 2020.

Amir Syamsudin. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Jakarta: 2014.

Arfan. *Metologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.

Arfan Ikhsan, Misri. *Metologi Penelitian*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

David Wijaya. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

David Wijaya. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

D Hendianto. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: 2008.

Dodi Nordiawan. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Dr. Kasmir, S.E., M.M. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Evi Grediani, S.E., M.Sc., Ak., C.A., SAS. *Akuntansi Syariah Pengantar*. Jawa Timur: Lakeisha, 2019.

Firdaus Hamka. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Buku Bahan Ajar, 2015.

Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.

Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.

Hasibun. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agun, 1984.

Halkadri Fitra. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Purwokerto: CV IRDH, 2019.

Halkadri Fitra. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Purwokerto: CV IRDH, 2019.

Hery, S.E., M.Si. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.

- Heru Cahyono. *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press, 2020.
- Indra Bastian. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta : Erlangga, 2015.
- Indra Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta : Erlangga, 2015.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Republik Indonesia: 2019.
- Maryunani. *Ekonomi Perdesaan*. Malang: Tim UB Press, 2020.
- Muammar Khaddafi, dkk. *Akuntansi Syariah*, h.17.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Munawir. *Pengantar Manajemen Keuangan Akuntansi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Musein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2000.
- Rahayu, R.P. *Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah*. Surabaya: Pustaka Indo, 2016.
- Rudianto. *Akuntansi Manajemen: Pengantar Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Rudianto. *Akuntansi Manajemen: Pengantar Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Rudianto. *Akuntansi Manajemen: Pengantar Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Manual & SPSS, n.d.*
- Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Manual & SPSS, n.d.*
- Yayah Pudir Shatu. *Kuasai Detail Akuntansi Laba & Rugi*. Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta, 2016.



Lampiran 01 : Laporan Dana Desa

KODE REKENING				URAIAN				Rindian Perhitungan		
1		2		3		4		5	6	
a	b	c	d	a	b	c	d	Volume	Satuan	Harga Satuan
PENDAPATAN										
4	1			Pendapatan Asli Desa						
4	1	1		Hasil Usaha						
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes						
4	2			Pendapatan Transfer						
4	2	1		Dana Desa						
4	2	1	01	Dana Desa				1	Tahun	834.776.000
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi						
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				1	Tahun	45.848.772
4	2	3		Alokasi Dana Desa						
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa				1	Tahun	451.014.000
4	3			Pendapatan Lain-lain						
4	3	6		Bunga Bank						
4	3	6	01	Bunga Bank				1	Tahun	7.305.000
JUMLAH PENDAPATAN										
5				BERANJA						
1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
1	1			Sul Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan & Operasional Pemerintah Desa						
1	1	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						
1	1	02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa						
1	1	03		Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1	1	04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa						
1	1	05		Penyediaan Tunjangan BPD						
1	1	06		Penyediaan Operasional BPD						
1	1	07		Penyediaan Operasional RT/RW						
1	2			Sul Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa						
1	2	01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan						
1	2	02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa						
				- Rehabilitasi Kantor Desa Mata Allo				1	Unit	44
1	3			Sul Bidang Penghasilan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan						
1	3	02		Permutakhiran Profil Desa (Pendataan SDGs Desa						
1	3	05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif						
1	4			Sul Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
1	4	01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)						
1	4	02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya						
1	4	03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPPMDesa/RM/PPesa dll)						
1	4	04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ, dll.)						
1	4	05		Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa						
1	4	07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat						
1	5			Sul Bidang Pertahanan						
1	5	06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						
2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
2	1			Sul Bidang Pendidikan						
2	1	08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa						
2	2			Sul Bidang Kesehatan						
2	2	02		Penyelenggaraan Posyandu						
2	2	03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan						
2	2	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan						
2	2	09		Rehabilitasi Prasarana Posyandu						
2	3	12		Pembangunan Jalan Usaha Tani						
2	3	12	5 3 5	1 Pengecoran Jalan Toendak - Dedekan (Jalan Pelebaran Baru)				180	Meter	163.231,0
2	4			Sul Bidang Kawasan Permukiman						
2	4	12		Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa						
				1 Sumur Bar				1	Paket	21
2	4	14		Pembangunan Fasilitas Jamban						
				1 Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Karang Mampu				17	Unit	3.628,00
2	6	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho, dll)						
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
3	1			Sul Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
3	1	07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat/Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat						
3	4			Sul Bidang Kelembagaan Masyarakat						
3	4	02		Pembinaan LKM/LPM/LPMD						
3	4	03		Pembinaan PKK						
4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
4	2			Sul Bidang Pertanian dan Perternakan						
4	2	03		Pengisian Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Jambang Desa dll)						
4	3			Sul Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						
4	3	01		Peningkatan kapasitas Kepala Desa						
4	3	02		Peningkatan kapasitas perangkat Desa						
4	3	03		Peningkatan kapasitas BPD						
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA						
5	3			Sul Bidang Kedarifan Mendesak						

Lampiran 02 : Dokumentasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6013/In.39.8/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TAHIRAH
Tempat/ Tgl. Lahir : BULU, 12 DESEMBER 2000
NIM : 18.2800.064
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : LAPALOPO, KELURAHAN MANARANG, KECAMATAN
MATTIROBULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA DI MATA ALLO
KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 19 Desember 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/044/DPMPSTP/ENR/IP/1/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

TAHIRAH

Nomor Induk Mahasiswa : **18.2800.064**
Program Studi : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWA**
Alamat Peneliti : **LAPALOPO**
Lokasi Penelitian : **DESA MATA ALLO KEC. ALLA**
Anggota/Pengikut : **-**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA DI MATA ALLO KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-01-02 s/d 2023-01-31**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
17/01/2023 10:04:37
KEPALA DINAS,




Dr. Ir. CHAIDAR BULLI, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah diandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1 of 1



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ALLA
DESA MATA ALLO

Alamat: Jalan Poros Kalosi-To'cemba, NO 36, Tlp. 0411 - 7770186

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 420.016/DMA/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: TAHIRAH
Program Studi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga	: Institut Agama Islam Pare-pare
Pekerjaan Peneliti	: Mahasiswa
Jenis kelamin	: Perempuan

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di wilayah Desa Mata Allo, Kec. Alla, Kab. Enrekang, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang", mulai dari tanggal 2 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

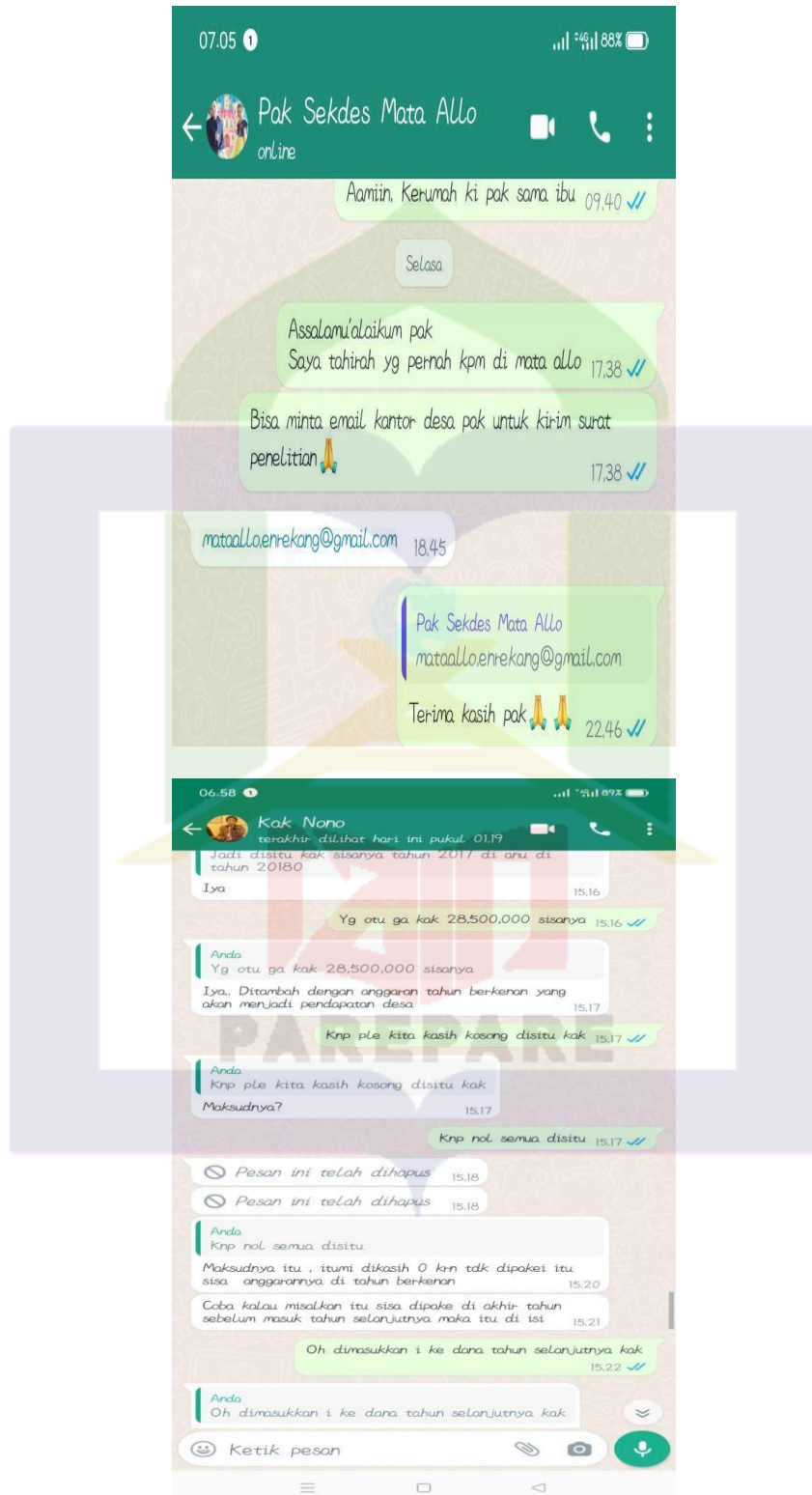
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

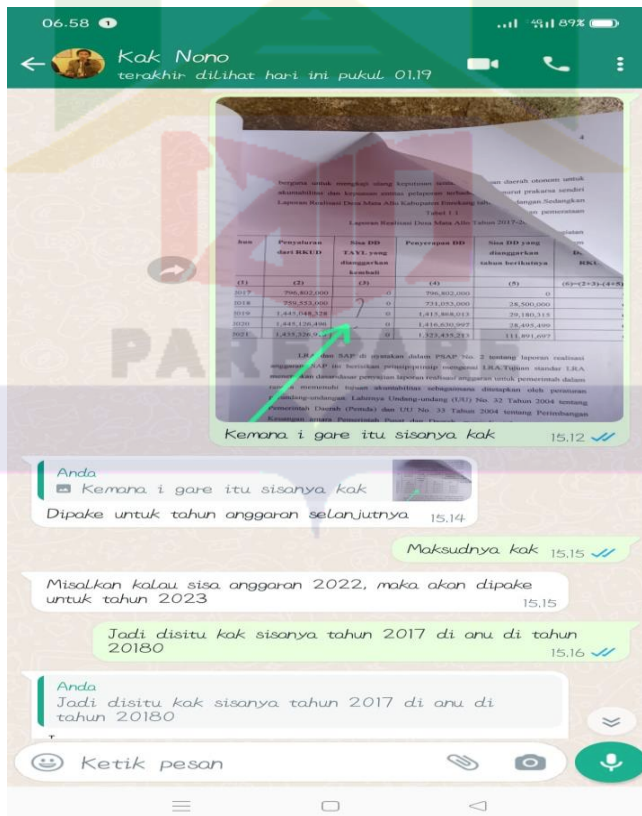
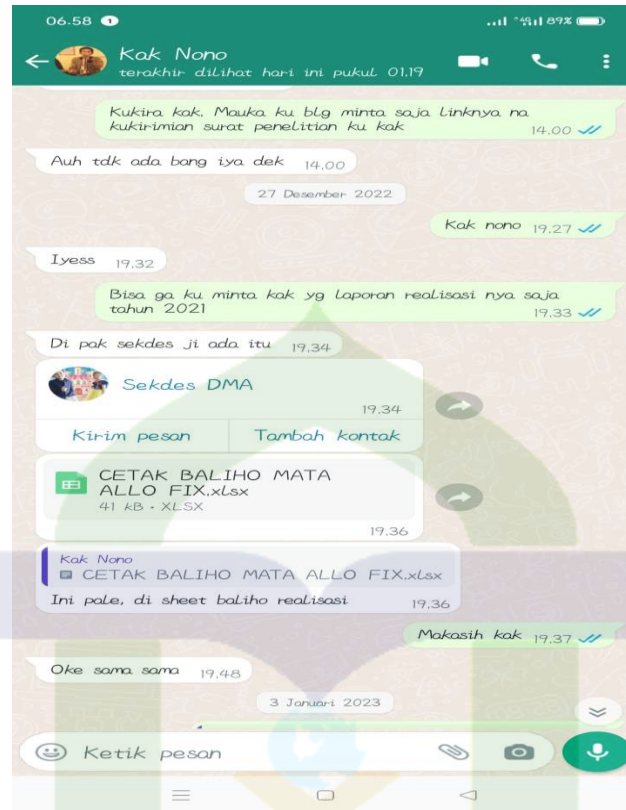
To'cemba, 31 Januari 2023
Kepala Desa Mata Allo



USMAN RASI

Lampiran 03 : Dokumentasi Penelitian

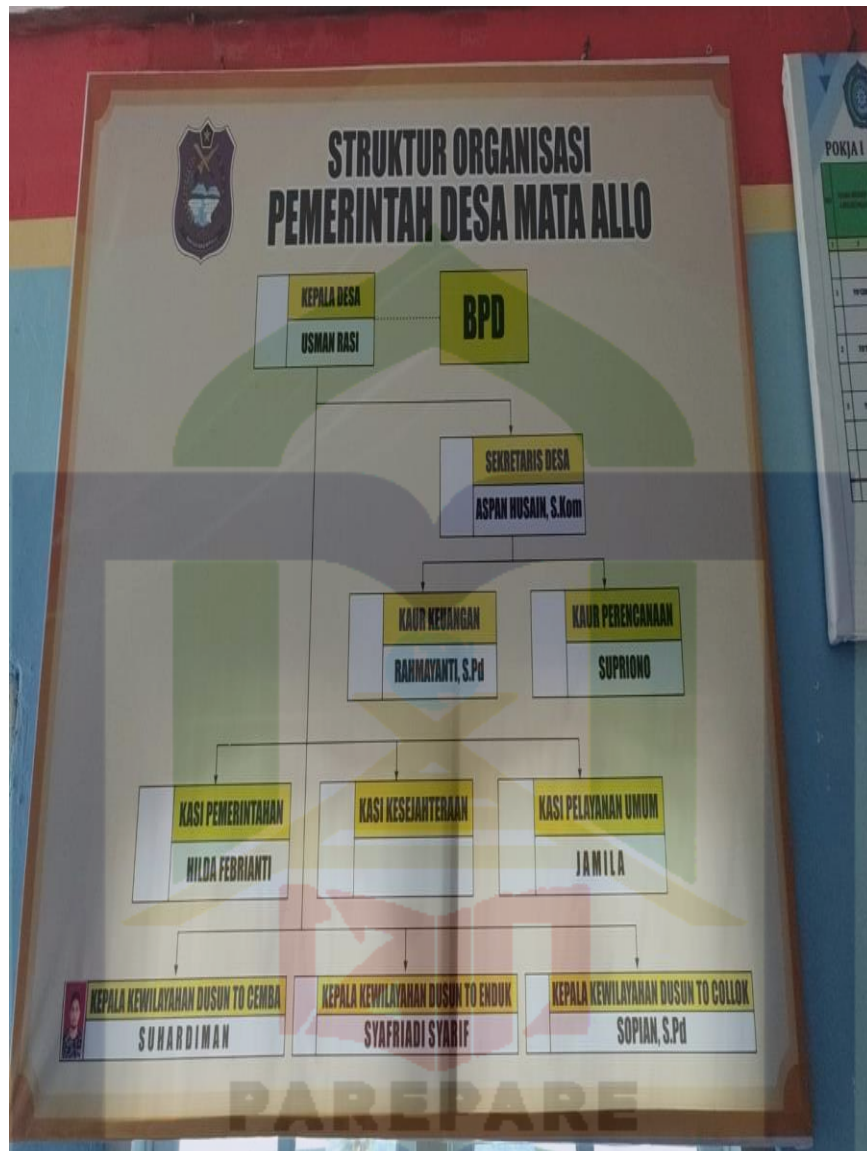




REALISASI PELAKSANAAN APBDesa 2021

DESA MATA ALLO

REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI	REKONSILIASI
1. Realisasi Anggaran	2. Realisasi Anggaran	3. Realisasi Anggaran	4. Realisasi Anggaran
BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNITAS DAN INFORMATIKA	BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNITAS DAN INFORMATIKA	BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNITAS DAN INFORMATIKA	BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNITAS DAN INFORMATIKA
Sub Bidang Perhubungan, Komunitas dan Informatika	Sub Bidang Perhubungan, Komunitas dan Informatika	Sub Bidang Perhubungan, Komunitas dan Informatika	Sub Bidang Perhubungan, Komunitas dan Informatika
1. Program KAWAN	1. Program KAWAN	1. Program KAWAN	1. Program KAWAN
2. Program KAWAN	2. Program KAWAN	2. Program KAWAN	2. Program KAWAN
BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang Keadan Mendesak	Sub Bidang Keadan Mendesak	Sub Bidang Keadan Mendesak	Sub Bidang Keadan Mendesak
JUMLAH BELANJA	JUMLAH BELANJA	JUMLAH BELANJA	JUMLAH BELANJA
SURPLUS / (DEFISIT)	SURPLUS / (DEFISIT)	SURPLUS / (DEFISIT)	SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN
1. Pembiayaan	1. Pembiayaan	1. Pembiayaan	1. Pembiayaan
2. Pembiayaan	2. Pembiayaan	2. Pembiayaan	2. Pembiayaan
JUMLAH PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN





BIODATA PENULIS



Tahirah nama panggilan irah. Saya lahir di bulu. 12 Desember 2000. Anak ke 2 dari 4 bersodara, dari pasangan bapak Tahang dan Rusmini . Saat ini penulis tinggal di Bulu. Kec. Mattirobulu.Kab Pinrang . Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SD di negeri 81 mattirobulu . Lulus tahun 2012, dan SMP 8 Pinrang Lulus Tahun 2015,dan SMA 7 Pinrang Lulus tahun 2018.

Hingga kemudian melanjutkan studi di jenjang S1 di institut agama Islam negeri (IAIN) kota Parepare dan memilih program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam. Dengan judul"Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Mata AlloKecamatan Alla Kabupaten Enrekang”